

## PENDOKUMENTASIAN KASUS HAM MELALUI SISTEM INFORMASI BEBASIS WEB

Padeli<sup>1</sup>  
Abas Sunarya<sup>2</sup>  
Agus Priyatna<sup>3</sup>

*e-mail: padeli@raharja.info; abas@raharja.info; agus.priyatna@raharja.info;*

Diterima : 14 Maret 2014 / Disetujui : 04 April 2014

### **ABSTRACT**

*The Agency of Human Rights Research and Development as the unit echelon 1 were under the Ministry of Law and Human Rights carry out research and development of human rights. In his duties often requires a human rights event data quickly and accurately. Submission of information on human rights is too long because of too many islands in Indonesia causing become longer to handling in human rights cases. This is because the process is still manual in documenting cases of human rights with form a team to be lowered to the area. The cost to take the data be very large because the data and the information is scattered in various provinces in Indonesia. On the other hand the data and information of human rights is something that is vulnerable, then the access to such information should be restricted to certain parties only. To overcome this must build web based system. The method used is the waterfall. Data storage using MySQL as a database server that generates 6 tables. This information systems provide access to users to perform information management of human rights through the provision and dissemination of human rights information and do the validation and publication of information on human rights that have been granted.*

*Keywords: System Information, Documentation, Human Rights, web*

### **ABSTRAKSI**

- 
- 1. Dosen Jurusan Sistem Informasi, STMIK Raharja**  
Jl. Jend Sudirman No. 40 Modern Cikokol-Tangerang Telp. 5529692
  - 2. Dosen Jurusan Komputer Akuntansi, AMIK Raharja**  
Jl. Jend Sudirman No. 40 Modern Cikokol-Tangerang Telp. 5529692
  - 3. Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi, STMIK Raharja**  
Jl. Jend Sudirman No. 40 Modern Cikokol-Tangerang Telp. 5529692

*Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia sebagai unit eselon 1 yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan di bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Didalam melaksanakan tugasnya seringkali memerlukan data peristiwa HAM yang cepat dan akurat. Penyampaian informasi HAM yang terlalu lama karena tersebarnya pulau di Indonesia menyebabkan lama pula penanganan kasus HAM. Hal ini dikarenakan proses pendokumentasian kasus HAM masih manual yaitu dengan membentuk tim untuk diturunkan ke daerah. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengambil data menjadi sangat besar karena data dan informasi tersebut tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Disisi lain data dan informasi tentang HAM merupakan sesuatu yang bersifat rentan, maka akses terhadap informasi tersebut harus dibatasi untuk pihak-pihak tertentu saja. Guna mengatasi hal ini dibuatlah sistem informasi dokumentasi kasus ham berbasis web. Metode yang digunakan yaitu waterfall. Penyimpanan data menggunakan MySQL sebagai database server yang menghasilkan 6 tabel. Sistem informasi ini memberikan akses kepada penggunanya untuk melakukan manajemen informasi HAM dalam bentuk pemberian dan penyebaran informasi HAM manajemen informasi HAM dalam bentuk pemberian dan penyebaran informasi HAM serta melakukan validasi dan publikasi terhadap informasi HAM yang sudah diberikan.*

*Kata Kunci : Sistem Informasi, Dokumentasi, Hak Asasi Manusia, web*

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.[1] Pendokumentasian kasus Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pengumpulan data-data yang terkait dengan peristiwa HAM. Pendokumentasian kasus HAM dilakukan guna mengetahui kebenaran suatu peristiwa dan validitas data. Pendokumentasian kasus HAM pada Badan Penelitian dan Pengembangan HAM digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan suatu penelitian atau kajian di bidang HAM untuk menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemangku kepentingan. Dengan pendokumentasian kasus HAM, setiap peristiwa yang terjadi akan dicatat dan di klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan.

Saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan HAM yang salah satu tugas pokoknya adalah melakukan penelitian dan pengembangan HAM masih mengalami kesulitan dalam pendokumentasian beragam kasus HAM. Ini dapat dirasakan ketika akan melakukan suatu kegiatan penelitian bidang HAM tim peneliti harus mencari sumber data valid yang memerlukan waktu untuk mendapatkannya. Sumber data

tersebut diperoleh dengan melakukan suatu kegiatan pengumpulan data peristiwa HAM yang dibentuk dalam tim khusus yang menangani pendokumentasian data peristiwa HAM. Untuk melaksanakan kegiatan pendokumentasian data ham ini akan melalui beberapa tahapan dan memerlukan waktu lama, akibatnya adalah data yang diperoleh sudah tidak aktual lagi. Dan sebagai alternatif data maka digunakanlah sarana media massa untuk mengidentifikasi kasus ham yang terjadi. Pengambilan data melalui media massa dirasakan tidak valid karena informasi yang disampaikan masih diragukan kebenarannya serta tidak lengkap menurut kebutuhan.

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM sebagai salah satu unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan HAM dirasa perlu untuk melakukan pendokumentasian kasus HAM ke dalam bentuk sistem informasi. Hal ini akan dapat memangkas birokrasi yang ada serta dapat menekan anggaran karena sistem yang digunakan bersifat online.

## 2. Metode Penelitian



Gambar 1. Ilustrasi Model Waterfall

### a. Analisa Kebutuhan

Untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dipahami perangkat seperti apa yang dibutuhkan user yang terdiri dari :

Instrumen penelitian

Terdiri dari hardware dan software.

- a.) Spesifikasi hardware yang digunakan yaitu :
  - 1) Intel Processor Core i3 2,2GHz
  - 2) RAM 2 GHz
  - 3) Hardisk 500 Gb
- b.) Spesifikasi Software yang digunakan yaitu :
  - 1) Apache2triad versi 1.5.4 merupakan package server yang terdiri dari Apache web server, PHP dan MySQL.
  - 2) Dreamweaver CS3 sebagai web design dan editor.

- 3) Web Browser menggunakan Google Chrome untuk menampilkan interface yang telah dibuat.

## **2. Metode Pengumpulan Data**

- a) Observasi  
Melakukan pencatatan terhadap sejumlah objek penelitian dari beberapa individu yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
- b) Wawancara  
Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab beberapa narasumber di Badan penelitian dan Pengembangan HAM.
- c) Studi Pustaka  
Mendapatkan informasi dari beberapa sumber literatur seperti buku, majalah, jurnal dan internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan sebagai bahan referensi.

### **b. Desain**

Dalam proses desain sistem menggunakan aplikasi Dreamweaver CS 3 sebagai web design dan code editor.

### **c. Pengkodean**

Pengkodean menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 5.1.2.

### **d. Pengujian/Penerapan**

Tahapan ini dilakukan di server Badan Penelitian dan Pengembangan HAM.

## **PERMASALAHAN**

Permasalahan yang ada pada sistem saat ini bahwa dalam mendokumentasikan kasus ham masih mengambil data ke daerah yang didahului dengan suatu kegiatan persiapan pembentukan tim yang memerlukan waktu lama. Masih terbatasnya data yang diberikan karena data tersebut tersebar di setiap propinsi. Untuk mendapatkan data tersebut pegawai harus datang langsung ke daerah narasumber berasal. Dengan cara ini, membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai ke tempat narasumber.

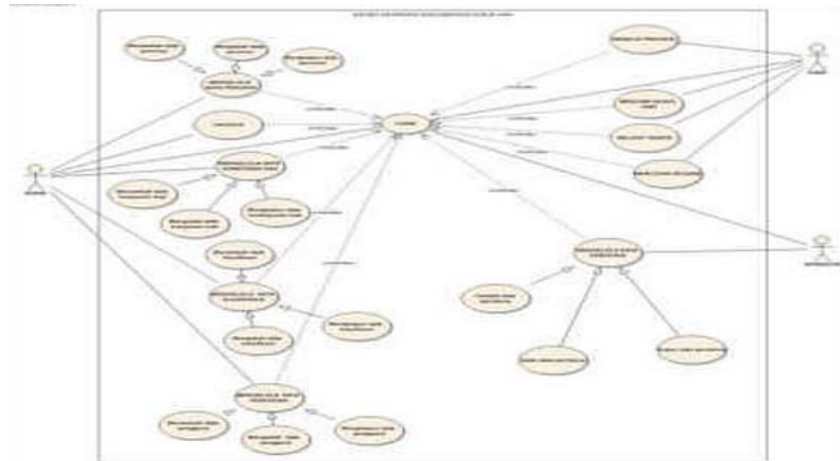
Media internet yang bisa menjangkau siapa saja dan dimana saja belum di manfaatkan dengan maksimal untuk mengatasi masalah ini.

Dari hasil penelitaian yang dilakukan terdapat beberapa kekurangan dan masalah yang terdapat pada prosedur sistem yang berjalan, antara lain yaitu :

- A. Dari prosedur yang berjalan, alur proses masih bergantung pada proses pengambilan informasi ke daerah yang memiliki masalah HAM secara langsung, hingga memerlukan waktu yang panjang saat penerimaannya.
- B. Informasi yang diperlukan belum di validasi kebenarannya, sehingga informasi yang belum valid pun bisa sampai ke masyarakat.
- C. Akses terhadap data dan informasi permasalahan HAM yang diambil dari narasumber belum ada sehingga setiap orang tidak dapat membaca dan mengetahui informasi peristiwa HAM yang terjadi.
- D. Akibat dari belum tersedianya sistem informasi berbasis web yang dapat menjangkau seluruh daerah maka proses yang berjalan membutuhkan biaya yang besar.

## **PEMECAHAN MASALAH**

Guna mengatasi masalah yang ada maka perlu dibuat sistem informasi untuk mengelola pendokumentasian kasus HAM berbasis web. Di dalam pengumpulan data peristiwa ham tidak perlu lagi untuk mengirim pegawai ke daerah. Pengelola sistem (administrator) hanya mengelola data yang sudah masuk dari daerah (diinput oleh operator daerah) kemudian di seleksi validitasnya. Setelah benar-benar memenuhi kriteria data tersebut bisa digunakan untuk di gunakan oleh pihak yang berkepentingan (user). Untuk bisa mengakses/membaca data peristiwa HAM user harus mempunyai otentikasi login, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui data tersebut digunakan untuk kepentingan penelitian maupun kajian sehingga terhindar dari penyalahgunaan data.



*Gambar 2. Use Case pada Sistem yang Diusulkan*

Berdasarkan gambar 2 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aktor Admin

Use Case : Mengelola data provinsi, mengelola data pengguna, mengelola data komponen hak, mengelola data klasifikasi hak, melakukan validasi data.

2. Aktor Operator

Use Case : Mengelola data peristiwa

3. Aktor User

Use Case : Memilih provinsi, mencari kasus HAM, melihat grafik, mencetak resume

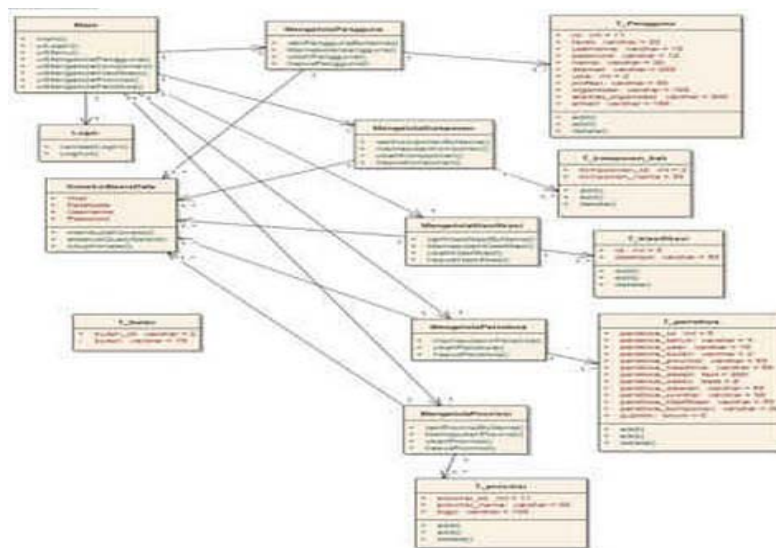


(Pengguna Informasi : Peneliti & LSM/NGO)

*Gambar 3 : Jaringan Sistem Informasi Dokumentasi Kasus HAM*

Pada gambar diatas sistem yang diusulkan terdapat 3 aktor yang terlibat dalam sistem yaitu :

1. Admin adalah pegawai yang berada dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM yang menguasai komputer ditunjuk sebagai pengelola sistem. Bertugas untuk mengelola data dan memvalidasi data peristiwa ham yang diinput oleh operator.
2. Operator adalah pegawai kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI bidang HAM yang bertugas melakukan input peristiwa ham di wilayahnya (tingkat provinsi)
3. User adalah orang yang menggunakan data untuk dilakukan penelitian dan kajian, user ini terdiri dari fungsional peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, orang yang bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM yang terdiri dari praktisi, akademisi, pemerintah provinsi, lembaga pemerintah/NGO yang menangani permasalahan ham di Indonesia.



Gambar 4 : Class Diagram Sistem yang diusulkan

Pada gambar diatas terdiri dari 6 (enam) tabel yaitu : T\_pengguna, T\_komponen\_hak, T\_klasifikasi, T\_provinsi, T\_peristiwa, T\_bulan.

## IMPLEMENTASI

### 1. Tampilan Menu Utama



*Gambar 5 : Tampilan Menu Utama*

Pada gambar diatas menampilkan halaman utama dari sistem. Terdapat 3 pengguna yang bisa dipilih yaitu Admin, User dan Operator.

### 2. Tampilan Halaman Admin



*Gambar 6 : Tampilan Halaman Admin*

Pada gambar diatas menunjukan halaman admin yang terdiri dari menu pengelolaan data master, data akun dan melakukan validasi data.

### 3. Tampilan Validasi Data pada Admin





*Gambar 7 : Tampilan Halaman Validasi Data*

Pada gambar diatas menunjukan halaman validasi yang fungsinya untuk melakukan validasi data apakah data tersebut layak dipublikasikan atau tidak.

#### **4. Tampilan Input Peristiwa pada Operator**



*Gambar 8 : Tampilan Halaman Input Peristiwa*

Pada gambar diatas menunjukan halaman input data peristiwa yang dilakukan oleh operator yang berada di Kantor Wilayah.

#### **5. Tampilan Peristiwa Provinsi pada User**



*Gambar 9 : Tampilan Halaman Provinsi*

Pada gambar diatas memperlihatkan tampilan halaman provinsi pada user yang fungsinya untuk melihat peristiwa di wilayah provinsi secara detail.

### 6. Tampilan Pencarian Data pada User



*Gambar 10 : Tampilan Pencarian Data*

Pada gambar diatas menampilkan halaman pencarian data yang dapat dikategorikan berdasarkan provinsi, tahun kejadian, klasifikasi jenis hak dan komponen hak.

### 7. Tampilan Indikator Grafik pada User



*Gambar 11 : Tampilan Indikator dalam Bentuk Grafik*

Pada gambar diatas menampilkan indikator dalam bentuk grafik yang menunjukkan presentase kasus ham yang dapat dispesifikasikan dalam beberapa kategori.

### 8. Tampilan Resume pada User



*Gambar 12 : Tampilan Resume*

Pada gambar diatas menampilkan resume yang merupakan statistik peristiwa ham berdasarkan kategori yang dapat dicetak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Dalam melakukan pendokumentasian kasus ham, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM masih melakukan pengambilan data ke daerah. Pengambilan data ini diawali dengan melakukan persiapan-persiapan yang memerlukan waktu yang lama. Untuk melakukan pengambilan data perlu dibentuk suatu tim kerja yang akan melakukan kegiatan ke daerah. Dengan cara ini memerlukan waktu sehari-hari untuk sampai ke tempat dimana narasumber berada. Pemanfaatan media internet belum bisa digunakan secara maksimal untuk mengatasi masalah ini.
2. Agar kegiatan pendokumentasian kasus ham bisa berjalan lebih efektif dan efisien maka diperlukan sistem informasi berbasis web. Penggunaan sistem informasi berbasis web bertujuan untuk menjangkau wilayah-wilayah indonesia yang sulit dilakukan kegiatannya karena faktor geografis.

### **Saran**

Beberapa saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan pertimbangan bagi Badan Penellitian dan Pengembangan HAM antara lain :

1. Memanfaatkan media internet secara optimal sebagai alat komunikasi dan pertukaran data.
2. Penggunaan sistem yang baru ini hendaknya dilakukan sosialisasi kepada pihak yang berhubungan dengan sistem ini sehingga dapat digunakan dengan baik.
3. Perlu dilakukan pelatihan bagi operator di setiap provinsi guna mengelola data peristiwa ham yang ada di wilayahnya.
4. Perlu adanya penunjukan administrator di kantor pusat sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh terhadap sistem.
5. Perlu adanya Standard Operational Procedure (SOP) berupa urutan penggunaan aplikasi bagi operator dan urutan pengelolaan dan pemeliharaan sistem bagi administrator.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. DJ Ravindran, 2003. Pencarian Fakta dan Pendokumentasian Pelanggaran HAM, Canadian Human Rights Foundation, Pustaka Nusa, Jakarta
2. Herbert F. Spierer & Louise Spire, 2005. Analisis Data Untuk Memantau HAM, ITB, Bandung
3. Huridocs, 2008. Informasi dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia,. Imparsial The Indonesia Human Rights Monitor, Jakarta
4. Langer Arthur M. 2008. Analysis and Design of Information Systems 3rd edition. Springer.
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Ham R.I Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia
6. Rosa dkk, 2011. Modul Pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak (Terstruktur dan Berorientasi Objek), Modula, Bandung
7. Soejono Trimo, 2005. Dari Dokumentasi ke Sistem Informasi Manajemen, Bandung: Remadja Karya,
8. ST, Anhar, 2010. Panduan Menguasai PHP & MySQL Secara Otodidak, Jakarta, Media Kita
9. Sulisty-Basuki, 2004. Pengantar Dokumentasi. Rekayasa Sains, Bandung
10. Sutabri Tata, 2012. Analisis Sistem Informasi. Penerbit Andi, Yogyakarta
11. Sutabri Tata, 2012. Konsep Sistem Informasi. Penerbit Andi, Yogyakarta